BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Kemudian di dalam penjelasan UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Muhammad Yamin di dalam buku Bahder Johan Nasution mendefinisikan sebagai berikut:

“Negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*”.²

Selanjutnya di dalam konsepsi Negara hukum, kekuasaan untuk menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep *rechtsstaat*, Franz Magnis Suseno di dalam Bahder Johan Nasution mengemukakan ciri *rechtsstaat*, yakni:

- a. Asas legalitas
- b. Kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman

¹Bahder Johan Nasution, *Negara dan Hak Asasi Manusia*, Cet. Ke 4, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 74.

²*Ibid.*, hal. 1.

- c. Perlindungan hak asasi manusia
- d. Sistem konstitusi hukum dasar.³

Negara hukum memiliki sistem konstitusi hukum dasar sebagaimana dijelaskan Hans Kelsen di dalam Ellydar Chaidir menyatakan bahwa Konstitusi negara biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan Undang-Undang, di samping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif.⁴

Di Indonesia sendiri memiliki sebuah konstitusi sebagai dasar hukum yaitu UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial.⁵ Lembaga-lembaga negara pada negara hukum dibentuk dan dijalankan dengan landasan Undang-Undang yang diberlakukan sesuai pada hierarki peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁶

Di tingkat pusat, lembaga negara dibagi dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu sebagai berikut:

³*Ibid.*, hal.20.

⁴Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 33.

⁵*Ibid.*, hal. 41.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 27.

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.⁷

Sebagaimana diketahui, kelembagaan negara di Indonesia sejak pasca Reformasi sampai saat ini telah banyak lembaga-lembaga negara baru yang biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.⁸ Adapun lembaga baru yang bersifat penunjang pasca reformasi salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Politik hukum pembentukan KPK diawali dengan upaya memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu amanat gerakan reformasi, setelah tumbang rezim Orde Baru.⁹ Dengan dibentuknya ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketetapan ini dirumuskan norma pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, yang

⁷*Ibid.*, hal. 43-44.

⁸*Ibid.*, hal. 7.

⁹Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang, 2016, hal. 34.

awalnya menjadi kewenangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).¹⁰

Setelah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, politik hukum pemberantasan korupsi diteruskan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Pasal 43 yang secara tegas mengatur amanat terbentuknya KPK.¹¹ Agar lebih jelasnya, berikut isi ayat-ayat dari Pasal 43 tersebut:

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan Undang-undang.

Akhirnya, berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Dengan Undang-Undang ini

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hal. 38.

¹²*Ibid.*, hal. 39.

dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalam pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi sebagai berikut “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Masuknya KPK kedalam rumpun kekuasaan eksekutif melalui ketentuan dari Pasal 3 tersebut menurut Idul Rishan Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, mengatakan “KPK tak ubahnya sebagai mandataris Presiden. Konsekuensinya, KPK berwarna eksekutif. Manajemen kepegawaiannya pun wajib bercorak eksekutif, dari status penyidik sampai promosi dan mutasi yang tunduk pada regulasi aparat sipil negara.”¹³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengubah ketentuan di dalam pasal-pasalnya dan juga

¹³<https://koran.tempo.co/read/opini/447308/ketika-kpk-dibawah-kuasa-presiden?>,(diakses pada 14 Juli 2020, pukul 23:40 WIB).

ada beberapa penambahan pasal. Struktur organ Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengalami perubahan. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, menjadi:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal di atas dibentuk struktur organ baru pada tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dibentuknya Dewan Pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37A ayat (1) sebagai berikut: “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.”

Besarnya otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sudah selazimnya berimplikasi pada adanya mekanisme kelembagaan yang mengerjakan pengawasan terhadap otoritas yang besar tersebut. Akan tetapi, pada lembaga negara independen yang terkadang sudah merupakan lembaga pengawas, menjadi sulit untuk memformat pengawasan atas pengawasan, yang bisa memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam wewenang yang besar tersebut, dengan tidak mengganggu independensi lembaga tersebut.¹⁴

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK, Idul Rishan juga berpendapat sebagai berikut:

¹⁴Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Kota Depok, 2019, hal. 146.

“Perangkat ini mempunyai kewenangan yang superior, bahkan dibekali kuasa *pro justitia*. Meskipun dalam pasal itu KPK diberi *irah-irah* independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kenyataannya sulit dibenarkan. Relasi kuasa yang bersifat vertikal dengan Presiden cenderung membuat KPK berayun menjadi *dependen*”¹⁵

Kemudian, dapat dilihat mengenai tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas KPK di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 37B ayat (1) sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) tahun.

Konsepsi tentang Dewan Pengawas sebagai organ pada lembaga independen tentunya perlu aturan yang lebih jelas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta batas-batasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tugas Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan di atas Pasal 37B ayat (1) huruf b “memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”. Pasal tersebut bersifat *pro justitia*

¹⁵*Ibid.*

sebagaimana pendapat dari Busyro Muqoddas mantan ketua KPK. Menurutnya, Kewenangan *pro justitia* yang menyebabkan Dewan Pengawas memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan, justru menimbulkan ketidak pastian hukum.¹⁶ Sehingga kewenangan Dewan Pengawas dapat mempengaruhi kinerja Penyidik KPK. Sebab dalam proses penyelidikan harus melalui proses administrasi dan proses birokrasi yang panjang.¹⁷

Sebagaimana pada kasus Operasi Tangkap Tangan Komisioner KPU, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal mengeledah kantor DPP PDI Perjuangan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menyebut kegagalan pada Kamis (09/01) lalu sudah diperkirakan sebelumnya ketika Revisi Undang-Undang KPK digodok pemerintah bersama DPR.¹⁸ Lebih lanjut menurut Donal Fariz “hal itu tak semestinya terjadi jika Dewan Pengawas KPK –yang kewenangannya tumpang tindih dengan posisi Pimpinan KPK- tidak ada. Sebab penyidik harus mengantongi izin pengeledahan, penyadapan, dan penyitaan dari pimpinan serta dewan sekaligus”.¹⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, masuknya KPK di dalam rumpun

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/153551691/di-sidang-mk-busyro-nilai-tak-tepat-dewas-kpk-punya-kewenangan-pro-justitia>(diakses pada 15 Juli 2020, pukul 03:45 WIB).

¹⁷*Ibid.*

¹⁸<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51096529> (diakses pada 7 Maret 2020, pukul 23:45 WIB).

¹⁹*Ibid.*

kekuasaan eksekutif tentu akan mereduksi lembaga anti korupsi itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya Dewan Pengawas yang memiliki wewenang bersifat *pro justitia*, yang dapat berimplikasi pada tugas dan wewenang penyidik. Seperti pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin.

Dengan adanya konflik norma terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK, serta implikasinya dengan Pimpinan KPK. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi mengenai **“Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kewenangannya Pimpinan KPK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kewenangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam struktur organ lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca dalam penelitian Ilmu Hukum Tata Negara. Serta menambah kajian perpustakaan mengenai kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem kelembagaan di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk membangun konsepsi lembaga KPK yang lebih baik di masa mendatang. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kedepan semakin kuat, tentu di perlukan lembaga KPK yang efektif.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui tentang penafsiran istilah pada judul skripsi maka penulis perlu menjelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial

(sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta digambarkan kedudukan (status) saja.²⁰ Jadi, Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan secara struktural maupun fungsional dalam suatu kekuasaan.

2. Dewan Pengawas

Kata Dewan menurut KBBI adalah “majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding”.²¹ Sedangkan kata Pengawas disebut dalam KBBI adalah “orang yang mengawasi”.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas adalah suatu majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang bertugas dalam hal mengawasi.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 1 telah menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

²⁰<http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, (diakses pada 24 Maret 2020, pukul 20:25 WIB)

²¹<https://kbbi.web.id/dewan>, (diakses pada 25 Maret 2020, pukul 22:53 WIB)

²²<https://kbbi.web.id/awas>, (diakses pada 25 Maret 2020, pukul 22: 58 WIB)

4. Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.²³

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Latar belakang sejarah lahirnya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) pada abad ke 19 di Eropa Kontinental, seiring dengan gagasan demokrasi konstitusional.²⁴ Selanjutnya, untuk lebih jelas harus diperhatikan ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Sudargo Gautama, mengemukakan tiga ciri-ciri Negara Hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.²⁵

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, (diakses pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 23:13 WIB)

²⁴Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. Ke 1, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 12.

²⁵Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Cet. Ke 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 117-118.

Selanjutnya Friederich menjelaskan ciri-ciri *rechtsstaat* yang klasik, yakni:

- a. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya peradilan tata usaha negara.²⁶

Sementara Friedman melihat negara hukum dalam dua arti yaitu

formil dan materil.

“Arti formil, dimana kekuasaan umum yang terorganisir (*organize public power*). Maksudnya setiap organisasi hukum atau organisasi negara mempunyai hukum. Sedangkan arti materil (*ideological sense*), yaitu hukum atau UU yang bisa diukur atau dinilai apakah baik atau tidak baik, adil atau tidak adil.”²⁷

2. Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan (*division and separation of power*) merupakan suatu mekanisme yang disusun sedemikian rupa, sehingga kekuasaan tidak terpusat dalam satu *polar* (kutub) tertentu. Kekuasaan dibagi menurut fungsinya dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang disesuaikan dengan sumber, tujuan, penggunaan dan pembatasan kekuasaan itu.²⁸ Secara umum, fungsi kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:

- (a) Fungsi membuat Undang-Undang (*rulemaking function-legislative*)
- (b) Fungsi pelaksana Undang-Undang (*rule application function-executive*)
- (c) Fungsi mengadili para pelanggar Undang-Undang (*rule adjudication function-judicative*)²⁹

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Op.Cit, hal. 18.

²⁷Ma'shum Ahmad, *Op.Cit.*, hal. 13.

²⁸Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hal. 19.

²⁹*Ibid.*

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁰ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

4. Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti “penjagaan”. Goerge R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana di kutip oleh Muchsan di dalam buku Imam Anshori Saleh berikut. “*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).³²

³⁰Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Raisul Muttaqien, Cetakan ke-10, Nusa Media, Bandung, 2018, hal. 53.

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

³²Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2014, hal. 126.

Pengawasan (*control*), menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.³³

Dari uraian di atas, Muchsan mengemukakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, langkah dalam melakukan analisis mempunyai sifat khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.³⁵ berkenaan dengan objek penelitian Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini telah terjadi konflik norma hukum terkait status, relasi dan kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam struktur organnya.

³³*Ibid.*

³⁴Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. Ke 3, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 38-39.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 87.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statuta aproach*) sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁶
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.³⁷
- c. Pendekatan komparatif (*coporate aproach*), yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.³⁸
- d. Pendekatan historis (*historical aproch*), yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.³⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶*Ibid.*, hal. 92.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hal. 92-93.

³⁹*Ibid.*, hal. 92.

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah ilmu hukum, dan bahan seminar, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan pada penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia dan kamus (*dictionary*) yang terkait dengan masalah terhadap penulisan skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dari berbagai referensi yang tersedia dan mendapatkan sebuah pemikiran yang relevan untuk mendapatkan konsep pemahaman yang lebih jelas tentang Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian membentuk suatu interpretasi nilai, norma, serta pandangan teoritis terhadap Kedudukan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya analisis dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi bahan-bahan hukum dan melakukan sistematisasi bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan keseluruhan bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran yang akan di bahas pada skripsi ini dapat dilihat sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pada Bab I memaparkan pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada Bab II akan memaparkan tinjauan pustaka mengenai Konsep Negara Hukum, Tinjauan Kelembagaan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Konsep Pengawasan. Dari paparan tinjauan pustaka ini diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

BAB III Pada Bab III membahas sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan implikasi hukum terhadap kewenangannya komisioner KPK dilihat dari status, srtuktur, kewenangan, serta hal lainnya sebagaimana yang telah diatur pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV Pada Bab IV merupakan penutup berisi uraian tentang kesimpulan dari skripsi ini serta saran dari penulis.